

Strategi Komunikasi Partisipatif Pemerintah Kelurahan Marang dalam Sosialisasi Kebijakan Lingkungan

Luci Afiani Oktavia*, Yuli Fatmawati, Widya Rahmat, Sabirin Muhtar

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Jl. RTA Milono Km. 1,5, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111, Indonesia.

*luciafianioktavia97@gmail.com

Article History:

Received	: 15/12/2025
Received in revised form	: 13/01/2026
Accepted	: 26/05/2026

Abstract: This study analyzes the participatory communication strategies used by the Marang Village Government to disseminate environmental policies amidst increasing ecological pressures and social diversity. The study employed a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including in-depth interviews, field observations, and document analysis. The results indicate that interpersonal communication and community-based approaches, particularly through the involvement of community leaders, are more effective in building trust and encouraging citizen participation than one-way communication through formal forums or social media. Although digital media accelerates the dissemination of information, its effectiveness remains limited due to unequal access and low levels of citizen engagement. The study also found a gap between policy understanding and environmental behavior practices, influenced by communication patterns and limited supporting infrastructure. Empirically, this study confirms the importance of participatory communication in environmental governance at the local level and provides policy implications for strengthening more inclusive and contextual communication strategies.

Keywords: environmental policy; government communication; participatory communication; public participation.

Abstrak: Penelitian ini menganalisis strategi komunikasi partisipatif yang digunakan Pemerintah Kelurahan Marang dalam menyosialisasikan kebijakan lingkungan di tengah meningkatnya tekanan ekologis dan keberagaman sosial masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal dan pendekatan berbasis komunitas, khususnya melalui keterlibatan tokoh masyarakat, lebih efektif dalam membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi warga dibandingkan komunikasi satu arah melalui forum formal maupun media sosial. Meskipun media digital mempercepat penyebaran informasi, efektivitasnya masih terbatas akibat ketimpangan akses dan rendahnya intensitas keterlibatan warga. Penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara pemahaman kebijakan dan praktik perilaku lingkungan yang dipengaruhi oleh pola komunikasi serta keterbatasan infrastruktur pendukung. Secara empiris, penelitian ini menegaskan pentingnya komunikasi partisipatif dalam tata kelola lingkungan di tingkat lokal serta memberikan implikasi kebijakan bagi penguatan strategi komunikasi yang lebih inklusif dan kontekstual.

Kata kunci: Kebijakan Lingkungan; Komunikasi Pemerintah; Komunikasi Partisipatif; Partisipasi Publik.

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan isu strategis dalam pembangunan daerah, khususnya di wilayah yang menghadapi tekanan ekologis akibat aktivitas manusia. Di Kelurahan Marang, Kota Palangka Raya, permasalahan lingkungan seperti peningkatan volume sampah rumah tangga, penurunan kualitas tanah dan air, serta berkurangnya tutupan vegetasi telah berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan lingkungan yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan ekosistem, tetapi juga pada perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan.

Keberhasilan kebijakan lingkungan tidak semata ditentukan oleh kualitas regulasi atau program yang disusun, melainkan sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada masyarakat. Dalam perspektif komunikasi pemerintahan, komunikasi kebijakan merupakan proses strategis untuk membangun pemahaman, penerimaan, dan dukungan publik. Ketika komunikasi kebijakan berlangsung secara satu arah dan bersifat *top-down*, kebijakan berpotensi hanya dipahami secara normatif tanpa diikuti oleh partisipasi aktif dan perubahan perilaku yang nyata di tingkat masyarakat.

Strategi komunikasi dalam kebijakan publik mencakup serangkaian keputusan terencana mengenai penyusunan pesan, pemilihan saluran komunikasi, serta teknik penyampaian yang disesuaikan dengan karakteristik audiens. Strategi komunikasi tidak sekadar berkaitan dengan pemanfaatan media, tetapi juga menuntut pemahaman terhadap kondisi sosial, budaya, dan tingkat literasi masyarakat agar pesan kebijakan dapat diterima secara efektif. Oleh karena itu, komunikasi kebijakan idealnya tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga partisipatif dan dialogis.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa strategi komunikasi pemerintah berpengaruh terhadap tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan publik. Putra et al. menegaskan bahwa komunikasi yang efektif dapat menurunkan resistensi masyarakat terhadap kebijakan, sementara Febriani dan Juliani menyoroti pentingnya penggunaan berbagai saluran komunikasi untuk menjangkau audiens yang heterogen. Syaputra, di sisi lain, menekankan bahwa komunikasi partisipatif memiliki peran signifikan dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut

masih berfokus pada efektivitas penyampaian informasi dan variasi saluran komunikasi, tanpa mengkaji secara kritis hubungan antara pola komunikasi pemerintah, tingkat partisipasi masyarakat, dan kesenjangan antara pemahaman kebijakan dan praktik perilaku lingkungan.

Secara teoretik, dominasi pendekatan komunikasi yang bersifat informatif mencerminkan kecenderungan pemerintah memposisikan masyarakat sebagai target sosialisasi, bukan sebagai aktor yang terlibat dalam proses kebijakan. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa peningkatan pengetahuan akan secara otomatis mendorong perubahan perilaku, padahal perubahan perilaku lingkungan sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan struktural. Ketika komunikasi kebijakan tidak membuka ruang dialog dan partisipasi, kebijakan cenderung berhenti pada tataran normatif dan sulit diterjemahkan ke dalam praktik keseharian masyarakat.

Kondisi di Kelurahan Marang tersebut diperkuat oleh keterbatasan infrastruktur lingkungan dan ketimpangan akses informasi. Sosialisasi kebijakan yang tidak disertai dengan mekanisme komunikasi partisipatif berpotensi menciptakan kesenjangan antara pesan kebijakan dan kemampuan masyarakat untuk mengimplementasikannya. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan lingkungan di tingkat lokal tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan antara pola komunikasi pemerintah, tingkat partisipasi masyarakat, dan kapasitas struktural yang dimiliki warga.

Berdasarkan uraian tersebut, celah penelitian (research gap) terletak pada masih terbatasnya kajian yang menganalisis strategi komunikasi kebijakan lingkungan di tingkat kelurahan dengan menempatkan komunikasi partisipatif sebagai kerangka analitis utama, terutama dalam konteks masyarakat yang heterogen dan memiliki keterbatasan infrastruktur. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi pemerintah Kelurahan Marang dalam menyosialisasikan kebijakan lingkungan dengan menekankan peran komunikasi partisipatif dalam mendorong partisipasi masyarakat serta menjelaskan kesenjangan antara pemahaman kebijakan dan praktik perilaku lingkungan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kajian komunikasi pemerintahan di tingkat lokal serta menjadi

dasar perumusan strategi komunikasi kebijakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis strategi komunikasi pemerintah Kelurahan Marang dalam sosialisasi kebijakan lingkungan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam proses komunikasi, dinamika sosial, serta interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks lokal. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Marang, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, selama kurang lebih enam bulan dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan lingkungan dan karakter sosial masyarakat yang heterogen.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan tingkat keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap kebijakan lingkungan. Informan meliputi aparat kelurahan, ketua RT, tokoh masyarakat, dan warga yang terlibat atau terdampak langsung oleh kebijakan lingkungan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen, seperti dokumen kebijakan, laporan kegiatan, serta materi sosialisasi kebijakan lingkungan baik cetak maupun digital.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis tematik dengan tahapan pengkodean, pengelompokan tema, dan penafsiran data secara sistematis. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola komunikasi pemerintah, tingkat partisipasi masyarakat, serta faktor pendukung dan penghambat dalam sosialisasi kebijakan lingkungan. Melalui proses analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan analitis mengenai efektivitas strategi komunikasi kebijakan lingkungan di tingkat kelurahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi pemerintah Kelurahan Marang dalam sosialisasi kebijakan lingkungan dilaksanakan melalui kombinasi berbagai saluran komunikasi, meliputi komunikasi interpersonal, forum

kelompok, pemanfaatan media sosial, serta pelibatan tokoh masyarakat. Namun demikian, temuan penelitian menegaskan bahwa keberagaman saluran komunikasi tersebut tidak secara otomatis berbanding lurus dengan efektivitas sosialisasi kebijakan. Efektivitas komunikasi kebijakan justru sangat ditentukan oleh pola komunikasi yang diterapkan dan tingkat partisipasi masyarakat yang terbangun dalam proses tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan lingkungan di tingkat kelurahan tidak dapat direduksi sebagai aktivitas teknis penyampaian informasi, melainkan sebagai proses sosial yang sarat dengan relasi kekuasaan, kepercayaan, dan konteks struktural masyarakat.

a. Komunikasi Interpersonal dan Dimensi Relasi Sosial.

Komunikasi interpersonal yang dilakukan melalui kunjungan lingkungan, percakapan langsung, dan interaksi informal antara aparat kelurahan dan masyarakat terbukti menjadi strategi komunikasi yang paling efektif. Efektivitas komunikasi interpersonal tidak hanya terletak pada kejelasan pesan kebijakan, tetapi terutama pada relasi sosial dan emosional yang terbangun antara komunikator dan warga. Dalam situasi komunikasi tatap muka, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, mengungkapkan keberatan, serta mendiskusikan kesulitan yang mereka hadapi dalam menerapkan kebijakan lingkungan.

Dalam perspektif teori komunikasi partisipatif, kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan yang efektif membutuhkan ruang dialog yang memungkinkan terjadinya pertukaran makna antara pemerintah dan masyarakat. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa komunikasi interpersonal berfungsi sebagai medium untuk membangun kepercayaan (trust), yang merupakan prasyarat utama bagi keterlibatan masyarakat dalam kebijakan publik. Tanpa kepercayaan, kebijakan cenderung dipersepsikan sebagai instruksi administratif semata, bukan sebagai upaya kolektif untuk memecahkan persoalan lingkungan.

b. Forum Kelompok dan Ilusi Partisipasi.

Forum kelompok seperti pertemuan RT/RW, musyawarah kelurahan, dan kegiatan PKK secara normatif dirancang sebagai ruang komunikasi publik. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa forum-forum tersebut belum sepenuhnya berfungsi sebagai ruang partisipatif. Sebagian besar warga hadir

secara fisik, tetapi tidak terlibat aktif dalam diskusi atau pengambilan makna terhadap kebijakan lingkungan yang disampaikan. Kondisi ini menunjukkan adanya ilusi partisipasi, di mana kehadiran warga tidak diikuti oleh keterlibatan substantif.

Dalam kerangka teori komunikasi partisipatif dan kebijakan publik, partisipasi tidak diukur dari kuantitas kehadiran, melainkan dari kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses komunikasi. Dominasi komunikasi top-down dalam forum kelompok di Kelurahan Marang memperlihatkan bahwa pemerintah masih memposisikan masyarakat sebagai audiens pasif. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat bukan semata-mata disebabkan oleh apatisme warga, melainkan oleh desain komunikasi kebijakan yang belum sepenuhnya membuka ruang dialog dan deliberasi publik.

c. Media Sosial dan Batasan Komunikasi Digital.

Pemanfaatan media sosial oleh pemerintah Kelurahan Marang, seperti grup WhatsApp dan Facebook komunitas, memberikan kemudahan dalam penyebaran informasi kebijakan lingkungan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa media digital memiliki keterbatasan dalam mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif. Ketimpangan akses internet, rendahnya literasi digital, serta karakter komunikasi media sosial yang cenderung satu arah menyebabkan pesan kebijakan tidak selalu diterima dan dipahami secara utuh oleh masyarakat.

Secara analitis, temuan ini menunjukkan bahwa media sosial dalam konteks Kelurahan Marang lebih berfungsi sebagai instrumen distribusi informasi daripada sebagai medium komunikasi partisipatif. Dalam perspektif kebijakan publik, ketergantungan berlebihan pada media digital tanpa diimbangi dengan komunikasi langsung berpotensi memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, media sosial seharusnya diposisikan sebagai pelengkap, bukan sebagai substitusi komunikasi tatap muka dalam sosialisasi kebijakan lingkungan.

d. Tokoh Masyarakat sebagai Mediator Kebijakan.

Pelibatan tokoh masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, dan ketua RT terbukti memperkuat efektivitas komunikasi kebijakan lingkungan. Tokoh-tokoh ini memiliki legitimasi sosial dan otoritas moral yang membuat pesan

kebijakan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dalam konteks komunikasi berbasis komunitas, tokoh masyarakat berfungsi sebagai mediator sosial yang mampu menerjemahkan bahasa kebijakan ke dalam nilai dan norma lokal.

Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi partisipatif tidak selalu harus dimediasi langsung oleh pemerintah. Sebaliknya, efektivitas komunikasi kebijakan justru meningkat ketika pemerintah mampu memanfaatkan aktor-aktor lokal yang memiliki kedekatan sosial dengan warga. Hal ini menjadi pembeda empiris penting dibandingkan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan peran institusi formal dalam komunikasi kebijakan.

e. Kesenjangan antara Pemahaman dan Praktik Perilaku Lingkungan.

Penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara pemahaman masyarakat terhadap kebijakan lingkungan dan praktik perilaku lingkungan sehari-hari. Meskipun sebagian besar warga menyadari pentingnya menjaga lingkungan, perilaku seperti pembuangan sampah sembarangan dan pembakaran sampah masih ditemukan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan tidak secara otomatis menghasilkan perubahan perilaku.

Dalam perspektif kebijakan publik, kesenjangan ini mencerminkan keterbatasan komunikasi kebijakan yang bersifat informatif. Perubahan perilaku membutuhkan komunikasi yang mampu menumbuhkan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap kebijakan, serta dukungan infrastruktur yang memungkinkan masyarakat menerapkan perilaku ramah lingkungan. Tanpa dukungan struktural yang memadai, komunikasi kebijakan berisiko menghasilkan kepatuhan simbolik tanpa perubahan perilaku yang berkelanjutan.

f. Penegasan Novelty Empiris Penelitian.

Novelty empiris penelitian ini terletak pada temuan bahwa efektivitas komunikasi kebijakan lingkungan di tingkat kelurahan tidak hanya ditentukan oleh variasi saluran komunikasi, sebagaimana banyak ditekankan dalam studi-studi sejenis, tetapi oleh kualitas partisipasi yang terbangun dalam proses komunikasi serta keterkaitannya dengan konteks sosial dan kapasitas struktural masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa dominasi komunikasi top-down berkontribusi pada rendahnya partisipasi dan kesenjangan antara

pemahaman dan praktik, sementara komunikasi berbasis komunitas dan pelibatan aktor lokal memiliki potensi yang lebih besar dalam mendorong perubahan perilaku lingkungan.

Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian komunikasi pemerintahan dan kebijakan publik dengan memberikan bukti empiris bahwa komunikasi partisipatif dan dukungan struktural merupakan dua elemen yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam keberhasilan kebijakan lingkungan di tingkat lokal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi kebijakan lingkungan di Kelurahan Marang tidak hanya ditentukan oleh keberagaman saluran komunikasi yang digunakan pemerintah, tetapi terutama oleh kualitas komunikasi yang bersifat partisipatif. Temuan penelitian menegaskan bahwa komunikasi interpersonal dan pendekatan berbasis komunitas lebih efektif dalam membangun kepercayaan dan mendorong keterlibatan masyarakat dibandingkan komunikasi satu arah melalui forum formal atau media digital. Dominasi pola komunikasi *top-down* berkontribusi pada rendahnya partisipasi warga dan memunculkan kesenjangan antara pemahaman kebijakan dan praktik perilaku lingkungan.

Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi empiris pada kajian komunikasi pemerintahan dengan menunjukkan bahwa komunikasi partisipatif merupakan prasyarat penting bagi efektivitas kebijakan lingkungan di tingkat kelurahan. Penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi kebijakan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan kapasitas struktural masyarakat, sehingga pendekatan komunikasi yang dialogis dan berbasis komunitas menjadi kunci dalam mendorong perubahan perilaku lingkungan yang berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah Kelurahan Marang perlu menggeser pendekatan komunikasi kebijakan dari pola informatif satu arah menuju komunikasi yang lebih partisipatif dan dialogis. Pelibatan tokoh masyarakat perlu dioptimalkan tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi sebagai mediator yang menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat. Selain itu, sosialisasi kebijakan lingkungan perlu disertai dengan penyediaan

infrastruktur pendukung agar masyarakat memiliki kapasitas nyata untuk menerapkan perilaku ramah lingkungan.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji strategi komunikasi kebijakan lingkungan melalui pendekatan komparatif antarwilayah atau dengan mengintegrasikan perspektif kebijakan publik secara lebih luas guna memperkaya pemahaman tentang relasi antara komunikasi, partisipasi, dan keberlanjutan lingkungan.

DAFTAR RUJUKAN

- Febriani, D. L., & Juliani, R. (2022). Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Mensosialisasikan Informasi Publik Di Kabupaten Aceh Barat. *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 19-38. (https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Febriani%2C+D.+L.%2C+%26+Juliani%2C+R.+%282022%29.+Strategi+Komunikasi+Pemerintah+Daerah+Dalam+Mensosialisasikan+Informasi+Publik+Di+Kabupaten+Aceh+Barat.+At-Tanzir%3A+Jurnal+Ilmiah+Prodi+Komunikasi+Penyiaran+Islam%2C+19-38.&btnG=), diakses 20 Oktober 2025.
- Liliweri, Y. K., & Lada, H. L. (2021). Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Kupang dalam Mensosialisasikan Program Smart City. *Jurnal Communio: Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, 10(2), 178-190. (https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Liliweri%2C+Y.+K.%2C+%26+Lada%2C+H.+L.+%282021%29.+Strategi+Komunikasi+Pemerintah+Kota+Kupang+dalam+Mensosialisasikan+Program+Smart+City.+Jurnal+Communio%3A+Jurnal+Jurusan+Ilmu+Komunikasi%2C+10%282%29%2C+178-190.&btnG=), diakses 20 Oktober 2025.
- Muckleston, K. W. (1990). Integrated water management in the United States. In M. Bruce (Ed.), *Integrated water management, international experiences and perspectives* (pp. xx-xx). London: Belhaven Press. (https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Muckleston%2C+K.+W.+%281990%29.+Integrated+water+management+in+the+United+States.+In+M.+Bruce+%28Ed.%29%2C+Integrated+water+management%2C+international+experiences+and+perspectives+%28pp.+xx-xx%29.+London%3A+Belhaven+Press.&btnG=), diakses 21 Oktober 2025.
- Putra, A. U., Salsabila, L., & Sianturi, S. (2022). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Sosialisasi Kebijakan Pandemi Covid-19 Di Tangerang Selatan. *Dialektika Publik*, 6(1), 23-27. (https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Putra%2C+A.+U.%2C+Salsabila%2C+L.%2C+%26+Sianturi%2C+S.+%282022%29.+Strategi+Pemerintah+Daerah+Dalam+Sosialisasi+Kebijakan+Pandemi+Covid-19+Di+Tangerang+Selatan.+Dialektika+Publik%2C+6%281%29%2C+23-27.&btnG=), diakses 20 Oktober 2025.
- Rahman, A., & Sjoraida, D. F. (2017). Strategi komunikasi pemerintah kabupaten Subang menyosialisasikan gerakan pembangunan untuk rakyat infrastruktur berkelanjutan. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 5(2), 136-146.

- (https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Rahman%2C+A.%2C+%26+Sjoraida%2C+D.+F.+%282017%29.+Strategi+komunikasi+pemerintah+kabupaten+Subang+menyosialisasikan+gerakan+pembangunan+untuk+rakyat+infrastruktur+berkelanjutan.+Jurnal+Kajian+Komunikasi%2C+5%282%29%2C+136-146.&btnG=), diakses 22 Oktober 2025.
- Sari, W. P., & Soegiarto, A. (2021). Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Daerah Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2), 188-205. (https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Sari%2C+W.+P.%2C+%26+Soegiarto%2C+A.+%282021%29.+Strategi+Komunikasi+Humas+Pemerintah+Daerah+Dalam+Mengimplementasikan+Kebijakan+Pembatasan+Sosial+Berskala+Besar.+Communicology%3A+Jurnal+Ilmu+Komunikasi%2C+9%282%29%2C+188-205.&btnG=), diakses 20 Oktober 2025.
- Sunley, E. M., Baunsgaard, T., & Simard, D. (2002). Revenue from the oil and gas sector: issues and country experience. Post conference draft for IMF conference. June 5-6.
- Syaputra, A. (2021). Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Penyebaran Informasi Pengelolaan Sampah Sungai Cidurian Selatan Kota Bandung. *AL-KALAM: JURNAL KOMUNIKASI, BISNIS DAN MANAJEMEN*, 8(2), 38-49. (https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Syaputra%2C+A.+%282021%29.+Strategi+Komunikasi+Pemerintah+dalam+Penyebaran+Informasi+Pengelolaan+Sampah+Sungai+Cidurian+Selatan+Kota+Bandung.+Al-KALAM%3A+JURNAL+KOMUNIKASI%2C+BISNIS+DAN+MANAJEMEN%2C+8%282%29%2C+38-49.&btnG=), diakses 20 Oktober 2025.
- Ulupui, I. G. K. A. (2007). Analysis of the influence of liquidity ratio, leverage, activity, and profitability on stock returns. *Journal of Accounting and Business*, 2(1), 88-102.
- Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2012). *Strategic management and business policy: achieving sustainability* (12th ed.). New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Widodo, A., & Permatasari, D. A. (2020). Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Bekasi Dalam Program Bekasi Smart City. *ETTISAL: Journal of Communication*, 5(1), 79-89. (https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Widodo%2C+A.%2C+%26+Permatasari%2C+D.+A.+%282020%29.+Strategi+Komunikasi+Pemerintah+Kota+Bekasi+Dalam+Program+Bekasi+Smart+City.+ETTISAL%3A+Journal+of+Communication%2C+5%281%29%2C+79-89.&btnG=), diakses 21 Oktober 2025.